

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah proses umum yang dilalui untuk mendapatkan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Mencari beberapa kumpulan penelitian yang terkait kemudian diangkat untuk mendukung penelitian yang dibuat agar penelitian semakin menguat.

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah atau negara. Menurut Mulyadi (2014:120) IPM merupakan indikator komposit tunggal yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di suatu wilayah.

Menurut Angga dan Titi (2020:198) IPM merujuk pada falsafah pembangunan nasional dimulai dengan mencermati tujuan dan sasaran pembangunan nasional yaitu peningkatan kualitas manusia dan peningkatan kualitas manusia sebagai sasaran pembangunan mengandung makna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar manusia.

Menurut Bonaraja Purba, dkk (2021:26) IPM merupakan sebuah konsep yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan alat

dari pembangunan. Namun, ide dasar dari pembangunan manusia yaitu menciptakan pertumbuhan positif dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, lingkungan serta perubahan dalam kesejahteraan manusia.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa IPM merupakan proses yang bertujuan untuk memperluas berbagai pilihan dengan menempatkan manusia sebagai fokus utama sekaligus tujuan akhir pembangunan, guna meningkatkan kualitas hidup manusia atau menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik melalui pemenuhan kebutuhan dasar.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang menggambarkan pencapaian pembangunan manusia dalam tiga dimensi utama: umur panjang dan sehat (kesehatan), pengetahuan (pendidikan), dan standar hidup layak (daya beli). Teori yang mendasari hubungan antara IPM dan PDRB adalah teori Human Capital oleh Schultz (1961) dan Becker (1964), yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia adalah salah satu penentu utama pertumbuhan ekonomi.

Kualitas manusia yang tinggi memungkinkan tenaga kerja menjadi lebih produktif, lebih adaptif terhadap teknologi, serta mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar. Tenaga kerja yang sehat dan terdidik cenderung memiliki kompetensi kerja yang baik, yang dapat meningkatkan efisiensi dan output ekonomi di berbagai sektor. Dengan demikian, provinsi yang memiliki IPM tinggi biasanya menunjukkan kinerja ekonomi yang lebih baik, tercermin dari PDRB yang lebih tinggi (Adiputra & Dewi, 2021).

2.1.1.1 Indikator Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Mardiasmo (2021:185), setiap komponen dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) distandardisasi dengan menetapkan nilai minimum dan maksimum. Proses ini dilakukan untuk menghitung indeks masing-masing komponen sebelum digunakan dalam perhitungan IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut:

1. Indeks kesehatan dengan rumus AHH (Angka Harapan Hidup)

$$I_{\text{kesehatan}} = (AHH - AHH_{\min}) / (AHH_{\max} - AHH_{\min})$$

2. Indeks pendidikan dengan menggunakan rumus yang berkaitan HLS (Harapan Lama Sekolah) dan (RLS) Rata-rata Lama Sekolah.

$$I_{\text{pendidikan}} = (I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}) / 2$$

3. Indeks pengeluaran dengan rumus berikut ini:

$$I_{\text{pengeluaran}} = [\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})] / [\ln(\text{pengeluaran}_{\max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})]$$

4. Setelah mendapatkan ketiga data di atas, masukkan ke rumus IPM yaitu sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$$

Setelah menggunakan rumus tersebut, nilainya dapat dicocokkan berdasarkan 3 kategori berikut ini:

- a. Apabila nilai IPM kurang dari 50 maka IPM rendah.
- b. Apabila nilai IPM antara 50 sampai 80 ($50 < \text{IPM} < 80$) maka termasuk kategori sedang.
- c. Terakhir, nilai IPM di atas 80 menunjukkan IPM tinggi.

2.1.1.2 Kegunaan Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia memiliki beberapa kegunaan, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengalihkan fokus perhatian para pengambil keputusan, media, dan organisasi non pemerintah dari penggunaan statistik ekonomi biasa, agar lebih menekankan pada pencapaian manusia. IPM diciptakan untuk menegaskan bahwa manusia dan segenap kemampuannya seharusnya menjadi kriteria utama untuk menilai pembangunan sebuah negara, bukannya pertumbuhan ekonomi.
2. Untuk mempertanyakan pilihan-pilihan kebijakan suatu negara. Bagaimana dua negara yang tingkat pendapatan perkapitanya sama dapat memiliki IPM yang berbeda.
3. Untuk memperlihatkan perbedaan di antara negara-negara, di antara provinsi-provinsi (atau negara bagian), di antara gender, kesukuan, dan kelompok sosial ekonomi lainnya. Dengan memperlihatkan disparitas atau kesenjangan di antara kelompok-kelompok tersebut,

maka akan lahir berbagai debat dan diskusi di berbagai negara untuk mencari sumber masalah dan solusinya.

2.1.2 Upah

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi. Menurut Hasibuan dalam Kadarisman (2012:122) mengungkapkan bahwa upah adalah balas jasa yang dibayarkan kepada pekerja harian dengan berpedoman atas perjanjian yang disepakati membayarnya.

Menurut Anamathofani (2019) Upah adalah imbalan *financial* langsung di bayarkan kepada tenaga kerja berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyak ya pelayanan yang dihasilkan. Sedanagkan menurut (Hadi, 2019) Upah adalah jumlah keseluruhan yang dibayarkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan tenaga kerja meliputi masa atau syarat tertentu.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa upah upah adalah balas jasa yang adil dan layak yang menjadi hak seluruh pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan dalam bentuk finansial yang telah disepakati dalam suatu perjanjian kerja.

2.1.2.1 Jenis-Jenis Upah

Menurut Zaeni Asyhadie (2019:80-82) terdapat lima jenis upah dalam berbagai kepustakaan hukum ketenagakerjaan bidang hubungan kerja dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Upah Nominal

Upah nominal yaitu sejumlah upah yang dibayarkan secara tunai kepada pekerja/buruh yang berhak sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja. Ada beberapa aspek yang dapat memengaruhi besarnya penetapan upah nominal, yaitu:

a. Aspek Kondisi Perusahaan

Melalui aspek ini dapat diperoleh kriteria perusahaan kecil, perusahaan menengah dan perusahaan besar, baik di dalam suatu sektor atau wilayah/daerah maupun berlainan sektor atau wilayah/daerah. Kriteria tersebut membawa konsekuensi pada kemampuan perusahaan yang tidak sama dalam memberi upah kepada pekerja/buruh.

b. Aspek Keterampilan Tenaga Kerja

Peningkatan produksi dan produktivitas kerja sangat ditentukan oleh kemampuan personil perusahaan, baik ditingkat bawah yaitu tenaga kerja terampil, maupun di tingkat atas yaitu pimpinan manajemen yang mampu menjadi penggerak tenaga kerja yang dipimpinnya untuk bekerja secara produktif. Tenaga kerja

merupakan modal dasar bagi perkembangan dari pertumbuhan ekonomi perusahaan, apabila tenaga kerja tersebut sebagai sumber daya ekonomi dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Kondisi ini memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan tenaga melalui pemberian upah yang lebih tinggi.

c. Aspek Standar Hidup

Peningkatan upah pekerja/buruh selain dipengaruhi oleh kondisi perusahaan dan keterampilan tenaga kerjanya, juga dipengaruhi oleh standar hidup pada suatu wilayah atau daerah di mana perusahaan itu berada.

d. Aspek Jenis Pekerjaan

Perbedaan pada jenis pekerjaan ini mengakibatkan terjadinya perbedaan tingkat upah, baik pada sektor yang sama maupun pada sektor yang berlainan. Tingkat pada sektor industri tidak sama dengan tingkat pada sektor pertanian dan sebagainya.

2. Upah Nyata (*Real Wages*)

Upah nyata yaitu upah yang nyata dan yang benar-benar harus diterima seorang pekerja/buruh yang berhak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan tergantung dari:

- a. Besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima
- b. Besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan

3. Upah Hidup

Upah hidup merupakan upah yang diterima pekerja/buruh relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas tidak hanya kebutuhan pokoknya saja melainkan juga kebutuhan sosial keluarganya seperti pendidikan, asuransi, rekreasi, dan lain-lain.

4. Upah Minimum

Upah minimum adalah upah terendah yang akan dijadikan standar oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja/buruh yang bekerja di perusahaannya.

5. Upah Wajar (*Fair Wages*)

Upah wajar adalah upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan pekerja/buruh sebagai imbalan atas jasa-jasanya pada perusahaan. Upah wajar ini sangat bervariasi dan selalu berubah-ubah antara upah minimum dan upah hidup sesuai dengan faktor-faktor yang memengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah:

- a. Kondisi perekonomian negara
- b. Nilai upah rata-rata di daerah di mana perusahaan itu berada
- c. Peraturan perpajakan
- d. Standar hidup para pekerja itu sendiri
- e. Posisi perusahaan dilihat dari struktur perekonomian negara.

2.1.3 Upah Minimum Provinsi (UMP)

Dalam upah ada yang dimaksud dengan upah minimum. Pengertian upah minimum dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum pada Bab I ketentuan Umum Pasal 1

menyatakan bahwa “Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman”.

Upah ini dijadikan rujukan oleh pengusaha sebagai standar minimum dalam menetapkan upah bagi para pekerjanya. Besaran upah minimum ini berbeda-beda di setiap daerah karena setiap daerah memiliki standar penghidupan layak yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu upah minimum tidak berlaku secara nasional, tetapi untuk daerah tertentu yang meliputi kabupaten/kota di satu provinsi atau disebut juga Upah Minimum Regional (UMR) (Suprihanto & Putri, 2021).

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan pada Bab V Pasal 25 menyebutkan bahwa upah minimum terdiri atas upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu. Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan upah minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/kota di satu Provinsi, sedangkan Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) merupakan upah minimum yang berlaku di wilayah Kabupaten/kota.

Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah kebijakan pemerintah untuk menjamin standar minimum pendapatan pekerja guna mencukupi kebutuhan hidup layak. Secara teori, hubungan antara UMP dan PDRB dapat dijelaskan melalui perspektif teori Keynesian dan teori distribusi pendapatan.

Dalam pandangan Keynesian, peningkatan upah akan meningkatkan daya beli masyarakat, yang mendorong konsumsi agregat dan pada akhirnya akan meningkatkan permintaan barang dan jasa. Permintaan agregat yang tinggi akan mendorong peningkatan produksi dan output ekonomi, yang tercermin dalam naiknya PDRB. Di sisi lain, dari perspektif distribusi pendapatan, upah minimum juga berperan dalam menciptakan keadilan sosial dan mendukung stabilitas ekonomi dengan menekan ketimpangan (Wicaksono & Walandouw, 2020).

2.1.3.1 Indikator Upah Minimum Provinsi

Dalam penetapan upah minimum provinsi faktor yang menjadi pertimbangan penentuannya yaitu: Kebutuhan Hidup Layak (KHL), inflasi, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar tenaga kerja, biaya hidup, kemampuan perkembangan kelangsungan perusahaan, perbandingan upah yang berlaku di daerah lain dan sebagainya. Dengan demikian, maka sangat dibutuhkan intervensi oleh pemerintah dalam hal penetapan upah minimum suatu daerah.

Penetapan upah minimum dihitung dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

a. Rumus Batas Atas

Batas atas $UM(t) = \text{Rata-rata konsumsi per kapita}(t) \times \text{Rata-rata banyaknya ART}(t) / \text{Rata-rata banyaknya ART bekerja pada setiap rumah tangga}(t)$

b. Rumus Batas Bawah

Batas bawah $UM(t) = \text{Batas atas } UM(t) \times 50\%$

Rumus Upah Minimum yang akan ditetapkan, sebagai berikut:

$$UM(t+1) = UM(t) + \{Max (PE(t), Inflasi(t)) \times (Batas atas(t) - UM(t) / Batas Atas(t) - Batas Bawah(t)) \times UM(t)\}$$

Keterangan:

UM = Upah Minimum

ART = Anggota Rumah Tangga

PE = Pertumbuhan Ekonomi

(t) = Tahun

2.1.4 Investasi

Investasi merupakan kegiatan penanaman modal, baik berupa uang, aset, maupun sumber daya lainnya, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau manfaat di masa depan. Investasi dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti membeli saham, obligasi, properti, emas, atau mendirikan usaha. Secara umum, investasi bertujuan untuk meningkatkan nilai kekayaan, memperoleh pendapatan pasif, atau memenuhi tujuan keuangan tertentu.

Menurut Sadono Sukirno (2016:121) menyatakan investasi yang lazim disebut juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Investasi dapat diartikan juga sebagai pengeluaran penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang modal.

Menurut Tandelilin (2017:2), mengemukakan bahwa investasi merupakan suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Sedangkan menurut Suhardi dkk (2022:1) investasi merupakan komitmen untuk mengorbankan konsumsi untuk menanamkan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa datang atau bisa diartikan juga komitmen untuk mengorbankan konsumsi sekarang dengan tujuan memperbesar konsumsi di masa datang.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa investasi penempatan sejumlah dana atau aset saat ini pada satu atau lebih aktiva yang dimiliki pada periode tertentu dengan membutuhkan waktu dan pengetahuan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang.

Investasi merupakan faktor utama dalam meningkatkan kapasitas produksi dan memacu pertumbuhan ekonomi. Teori Harrod-Domar dan teori pertumbuhan Solow menjelaskan bahwa investasi menciptakan modal baru, memperluas kapasitas produksi, dan menghasilkan output ekonomi yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Investasi juga menciptakan efek ganda (multiplier effect) terhadap sektor-sektor lain seperti jasa, perdagangan, dan infrastruktur, yang semuanya berkontribusi terhadap peningkatan PDRB (Susilo & Fitrani, 2019).

2.1.4.1 Jenis-Jenis Investasi

Menurut Gusti Ayu dan Diota Prameswari (2017:3) Berikut adalah jenis-jenis dari investasi:

1. Investasi Kekayaan rill (*real property*)

Investasi yang dilakukan pada aset yang tampak secara nyata seperti tanah, bangunan dan yang secara permanen melekat pada tanah termasuk apartemen, ruko, kondominium dan sebagainya.

2. Investasi Kekayaan Pribadi yang Tampak (*tangible personal property*)

Investasi yang dilakukan pada benda-benda seperti emas, berlian, barang antik dan termasuk benda-benda seni seperti lukisan dan lain-lain.

3. Investasi Keuangan (*financial investment*)

Investasi yang dilakukan pada surat berharga baik yang ada di pasar uang (*money market*) seperti deposito, SBI, SPBU maupun surat berharga di pasar modal (*capital market*) seperti saham, obligasi, dan berbagai bentuk surat berharga pasar modal lainnya.

4. Investasi Komoditas (*commodity investment*)

Investasi yang dilakukan pada komoditas dalam artian barang seperti kopi, kelapa sawit dan lain-lain. Investasi pada sektor ini disebut sebagai perdagangan berjangka.

2.1.4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi

Menurut Sadono Sukirno (2015:122), disamping ditentukan oleh harapan di masa depan untuk memperoleh untung, beberapa faktor lain juga penting peranannya dalam menentukan tingkat investasi yang dilakukan dalam perekonomian. Faktor-faktor utama yang menentukan tingkat investasi adalah:

1. Tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh.
2. Suku bunga.
3. Ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan.
4. Kemajuan teknologi.
5. Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya.
6. Keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan.

2.1.5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah tertentu (seperti provinsi atau kabupaten/kota) dalam periode waktu tertentu, biasanya satu tahun. PDRB mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi dan menjadi indikator penting untuk mengukur pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Prasetyo (2011:18) PDRB iadalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Sedangkan menurut Sukirno (2016;101), PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah atau provinsi.

Di sisi lain, menurut Januardy A.J Hidayat (2010) menjelaskan bahwa produk domestik regional bruto (PDRB) yaitu nilai tambah bruto dari berbagai sektor-sektor ekonomi yang ada serta lapangan usaha yang berkontribusi terhadap nilai barang dan jasa yang dihasilkan dari daerah selama satu tahun anggaran.

2.1.5.1 Fungsi PDRB

Terdapat beberapa fungsi Fungsi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diantaranya:

1. Menunjukkan besarnya pendapatan dan kemampuan sumber daya ekonomi yang ada di suatu wilayah.
2. Menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun.
3. PDRB menurut sektor menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor perekonomian dalam suatu wilayah.
4. PDRB menurut penggunaan menunjukkan besarnya produk barang dan jasa yang digunakan untuk tujuan konsumsi dan investasi.
5. PDRB atas harga berlaku digunakan untuk menunjukkan besarnya struktur perekonomian dalam peranan sektor ekonomi.
6. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

2.1.5.2 Metode Perhitungan PDRB

1. Metode Langsung

1. Pendekatan Produksi

Dengan pendekatan Produksi (*production approach*) produk nasional atau produk domestik bruto diperoleh dengan menjumlahkan nilai pasar dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor dalam perekonomian. Dengan demikian, GNP atau GDP menurut pendekatan produksi ini adalah penjumlahan dari masing-

masing barang dan jasa dengan jumlah atau kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan, hal ini secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$Y = (Q_1 \times P_1) + (Q_2 \times P_2) + (Q_3 \times P_3) + \dots + (Q_n \times P_n)$$

Keterangan :

Y = Pendapatan Nasional

Q_1, Q_2, Q_3 , dan Q_n = jumlah jenis barang ke-1, ke-2, ke-3, ke-n

P_1, P_2, P_3 , dan P_n = harga jenis barang ke-1, ke-2, ke-3, ke-n

2. Pendekatan Pendapatan.

Pendekatan pendapatan (*income approach*) adalah suatu pendekatan dimana pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang menyumbang terhadap proses produksi. Dalam hubungan ini pendapatan nasional adalah penjumlahan dari unsur-unsur atau jenis-jenis pendapatan.

- a. Kompensasi untuk pekerja (*compensation for employees*), yang terdiri dari upah (*wages*) dan gaji (*salaries*) ditambah faktor rent terhadap upah dan gaji (misalnya kontribusi pengusaha untuk rencana-rencana pensiun dan dana jaminan sosial), dan ini merupakan komponen terbesar dari pendapatan nasional.
- b. Keuntungan perusahaan (*corporate profit*), yang merupakan kompensasi kepada pemilik perusahaan yang mana sebagian dari padanya digunakan untuk membayar pajak keuntungan

perusahaan (*corporate profit takes*), sebagian lagi dibagikan kepada para pemilik saham (*stockholders*) sebagai deviden, dan sebagian lagi ditabung perusahaan sebagai laba perusahaan yang tidak dibagikan.

- c. Pendapatan usaha perorangan (*proprietors income*), yang merupakan kompensasi atas penggunaan tenaga kerja dan sumber-sumber dari *self employed person*, misalnya petani, self employed profesional, dan lain-lain. dengan perkataan lain proprietors income merupakan pendapatan new korporasi.
- d. Pendapatan sewa (*rental income of person*), yang merupakan kompensasi untuk pemilik tanah, rental business dan residential properties, termasuk didalamnya pendapatan sewa dari mereka yang tidak terikat dalam bisnis *real estate*: pendapatan sewa dihitung untuk rumah-rumah yang *non farm* yang dihuni oleh pemiliknya sendiri; dan *royalties* yang diterima oleh orang dari hak paten, hak cipta, dan hak terhadap sumber daya alam.
- e. Bunga netto (*net interest*) terdiri atas bunga yang dibayar perusahaan dikurangi oleh bunga yang diterima oleh perusahaan ditambah bunga netto yang diterima dari luar negeri. Bunga yang dibayar oleh pemerintah dan yang dibayar oleh konsumen tidak termasuk didalamnya. Secara matematis pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pendapatan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$N_i = Y_w + Y_r + Y_{nr} + Y_{nd}$$

Dimana:

Y_w = Pendapatan dari upah, gaji dan pendapatan lainnya sebelum pajak

Y_r = Pendapatan dari bunga

Y_{nr} dan Y_{nd} = Pendapatan dari keuntungan dari perusahaan dan pendapatan lainnya sebelum pendapatan lainnya sebelum pengenaan pajak.

3. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran adalah pendekatan pendapatan nasional atau produk domestik regional bruto diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai pasar dari seluruh permintaan akhir (*final demand*) atas output yang dihasilkan dalam perekonomian, diukur pada harga pasar yang berlaku. Dengan perkataan lain produk nasional atau produk domestik regional bruto adalah penjumlahan nilai pasar dari permintaan sektor rumah tangga untuk barang-barang konsumsi dan jasa-jasa (C), permintaan sektor bisnis barang-barang investasi (I), pengeluaran pemerintah untuk barang-barang dan jasa-jasa (G), dan pengeluaran sektor luar negeri untuk kegiatan ekspor dan impor (X-M).

2. Metode Tidak Langsung

Menghitung nilai tambah suatu kelompok ekonomi dengan mengalokasikan nilai tambah kedalam masing-masing kelompok kegiatan ekonomi pada tingkat regional sebagai alokator digunakan yang paling besar

tergantung atau erat kaitannya dengan produktifitas kegiatan ekonomi tersebut melalui PDRB menurut harga berlaku dan harga konstan. Pendapatan regional suatu provinsi dapat diukur untuk menghitung kenaikan tingkat pendapatan masyarakat. Kenaikan ini dapat disebabkan karena dua faktor yaitu:

- a. Kenaikan pendapatan yang benar-benar bisa menaikkan daya beli penduduk (kenaikan riil).
- b. Kenaikan pendapatan yang disebabkan oleh karena inflasi, kenaikan pendapatan yang disebabkan karena kenaikan harga pasar tidak menaikkan daya beli penduduk dan kenaikan seperti ini merupakan kenaikan pendapatan yang tidak riil. Oleh karena itu berdasarkan kenyataan diatas untuk mengetahui kenaikan pendapatan yang sebenarnya (riil) maka faktor yang harus dieliminir pendapatan regional dengan faktor inflasi (faktor inflasi belum dihilangkan) merupakan pendapatan regional dengan harga berlaku, sedangkan pendapatan regional dimana faktor inflasi tidak lagi diperhitungkan disebut dengan pendapatan regional atas dasar harga konstan.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai sumber kreativitas yang nantinya dapat membantu peneliti dalam melakukan sebuah penelitian. Penelitian terdahulu akan memudahkan kita dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk menyusun sebuah penelitian dari segi teori dan konsep.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| No | Penulis, Judul, Tahun | Persamaan | Perbedaan | Hasil | Sumber |
|----|---|---|---|--|---|
| 1 | Hierdawati, <i>Analysis Of The Effect Of Gross Regional Domestic Product, Provincial Minimum Wage, Human Development Index And Investment On Unemployment In Jambi Province, 2024</i> | - PDRB - UMP - IPM - Investasi | - Pengangguran | Variabel PDRB, UMP, IPM, dan Investasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengangguran | <i>Sean Institute</i> Jurnal Ekonomi, Vol. 13, No. 03 |
| 2 | Irawan, <i>The Impact of Human Development Index, Minimum Wage, Labor Force Participation Rate, and Open Unemployment Rate on Economic Growth, 2024</i> | - IPM - UMP | - Partisipasi tenaga kerja - Tingkat pengangguran terbuka - Pertumbuhan ekonomi | UMP dan pengangguran terbuka berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi | IISTR, Jurnal studi manajemen dan pembangunan Vol. 3, No. 01 |
| 3 | Lokiman, <i>Pengaruh UMP, Investasi Swasta terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Dampaknya pada PDRB (ADHK) di Kota Manado Tahun 2003-2012, 2018</i> | - UMP - Investasi - PDRB | Penyerapan tenaga kerja | UMP dan investasi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja dan berpengaruh terhadap pdrb | Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Jurnal ekonomi Vol. 07, No.01, Hal 177-181 |
| 4 | Tjaja, <i>Pengaruh Tenaga Kerja,</i> | - UMP - PDRB | - Tenaga kerja - PAD | UMP, PAD, dan tenaga | <i>The Journal Of Economic</i> |

| | | | | | |
|-----|---|--------------------------------|--|---|--|
| | UMP, dan PAD terhadap PDRB per kapita di Wilayah Sumatera 2010-2020, 2022 | | | kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pdrb | <i>Development</i> Vol. 4, No. 1, Hal 54-68 |
| 5 | Budiardjo, Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap PDRB (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018, 2020 | - Investasi - IPM - PDRB | Tenaga kerja | Investasi, dan tenaga kerja tidak memiliki pengaruh positif, sedangkan ipm memiliki pengaruh positif dan signifikan | Ejournal Undip, Vol. 9 No. 2 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 6 | Winowoda, Pengaruh IPM, Tenaga Kerja dan Belanja Pemerintah terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Utara, 2023 | - IPM - PDRB | - Tenaga kerja - Belanja pemerintah | IPM tidak berpengaruh terhadap pdrb, sedangkan belanja pemerintah dan tenaga kerja berpengaruh terhadap pdrb di provinsi sulawesi utara | Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 23 No. 7 |
| 7 | Agusta, Analisa Pengaruh IPM, PMTB, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Terhadap PDRB Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019, 2023 | - IPM - PDRB | - PMTB - Belanja langsung - Belanja tidak langsung | Ipm, pmbt, belanja tidak langsung, dan belanja langsung berpengaruh positif terhadap pdrb kab/kota di provinsi Jawa Tengah. | Fokus EMBA, Vol. 02 No. 01 |
| 8 | Kristina, Pengaruh PAD, IPM Dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/Kota | - IPM - PDRB | - PAD - Tenaga kerja | PAD, IPM, dan Tenaga kerja memiliki pengaruh positif terhadap pdrb di pulau Jawa | JIE, Jurnal ilmu ekonomi Vol. 1 Jilid 2, Hal 176-188 |

| di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2016), 2017 | | | Timur | | |
|---|---|-----------------------|---|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 9 | Parahita, Analisis Faktor yang Mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Industri di Provinsi Jawa Barat Tahun 2002-2016, 2018 | - UMP - PDRB | - Tenaga kerja - PAD | PMA dan UMP berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB. tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB. | Jurnal Ilmu Ekonomi, SCA No. 8 |
| 10 | Nada, Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, UMK dan Unit Usaha terhadap PDRB Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2021, 2024 | - Investasi - PDRB | - Tenaga kerja - UMK - Unit usaha | Investasi memiliki pengaruh yang positif, sedangkan tenaga kerja dan umk tidak berpengaruh terhadap pdrb | JHSS, Vol. 7 No. 2 |
| 11 | Ngabiyanto, Analisis Pengaruh Investasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan, 2024 | - Investasi - PDRB | Pembangunan | Pma memiliki pengaruh yang positif terhadap pdrb, sedangkan ipm, jumlah angkatan tenaga kerja, tidak memiliki pengaruh positif terhadap pdrb | <i>Business and Accounting Education Journal</i> Vol. 4 No. 1 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 12 | Feriyandi, Pengaruh Angkatan Kerja dan Investasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Lampung, 2023 | - Investasi - PDRB | Angkatan kerja | Tenaga kerja, pengangguran terbuka, dan penanaman modal dalam negeri mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pdrb | JONEDU Vol. 06, No. 01 |
| 13 | Suryantari, Pengaruh | - Investasi - PDRB | - Belanja modal | Investasi, belanja modal | Jurnal EP Unud Vol. 10 |

| | | | | | |
|-----|---|-----------------------|--------------------------------|---|--|
| | Investasi, Belanja Modal, Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali, 2023 | | - Tenaga kerja | dan tenaga kerja berpengaruh signifikan secara simultan dan parsial terhadap PDRB di provinsi Bali | No. 11 |
| 14 | Sianturi, Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Di Jawa Timur, 2018 | - Investasi - PDRB | Tenaga kerja | Investasi dan Tenaga Kerja berpengaruh secara simultan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Jawa Timur. | JEB Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 17, Hal 573-588 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 15 | Widiyanto, Pengaruh Investasi, Jumlah Penduduk, Dan Inflasi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2014-2018, 2022 | - Investasi - PDRB | - Jumlah penduduk - Inflasi | Investasi dan jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan, sementara inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap pdrb | <i>Journal On Economics</i> Vol.11, No.1 |

2.2 Kerangka Pemikiran

Manfaat kerangka berpikir adalah membantu peneliti dalam mendapatkan suatu konsep yang matang yang kemudian dimanfaatkan untuk menjelaskan setiap masalah dalam penelitian, serta memudahkan peneliti dalam menghubungkan setiap bagian yang ada di dalam penelitian.

2.2.1 Hubungan IPM dengan PDRB

Menurut Syafitri (2023) menyatakan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki hubungan yang erat, di mana PDRB mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi suatu wilayah, sementara IPM menggambarkan kualitas hidup masyarakatnya.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utomo (2020), Sukma (2022), dan Fitria (2023), yang menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) memiliki pengaruh positif terhadap produk domestik regional bruto (PDRB). Peningkatan IPM memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah.

Peningkatan PDRB per kapita dapat memberikan dampak positif terhadap IPM, karena pertumbuhan ekonomi biasanya disertai dengan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pendapatan. Sebaliknya, peningkatan IPM juga dapat mendorong produktivitas ekonomi, karena masyarakat yang lebih sehat, terdidik, dan sejahtera cenderung lebih berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi wilayah. Dengan demikian, keduanya saling memengaruhi dalam proses pembangunan berkelanjutan.

2.2.2 Hubungan UMP dengan PDRB

Upah Minimum Provinsi (UMP) memiliki hubungan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), karena UMP dapat memengaruhi daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi suatu wilayah. Ketika UMP meningkat, daya

beli pekerja juga cenderung meningkat, sehingga mendorong konsumsi rumah tangga yang merupakan salah satu komponen penting dalam perhitungan PDRB.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kabir (2019), Kusuma (2021), dan Shah (2022), yang menyatakan bahwa upah minimum provinsi memiliki pengaruh positif terhadap produk domestik regional bruto. Kenaikan UMP dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Kenaikan UMP juga dapat mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja jika diimbangi dengan peningkatan keterampilan dan efisiensi. Namun, jika kenaikan UMP tidak sejalan dengan produktivitas, hal ini berpotensi meningkatkan biaya operasional bagi pelaku usaha, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kinerja ekonomi wilayah dan pertumbuhan PDRB.

2.2.3 Hubungan Investasi dengan PDRB

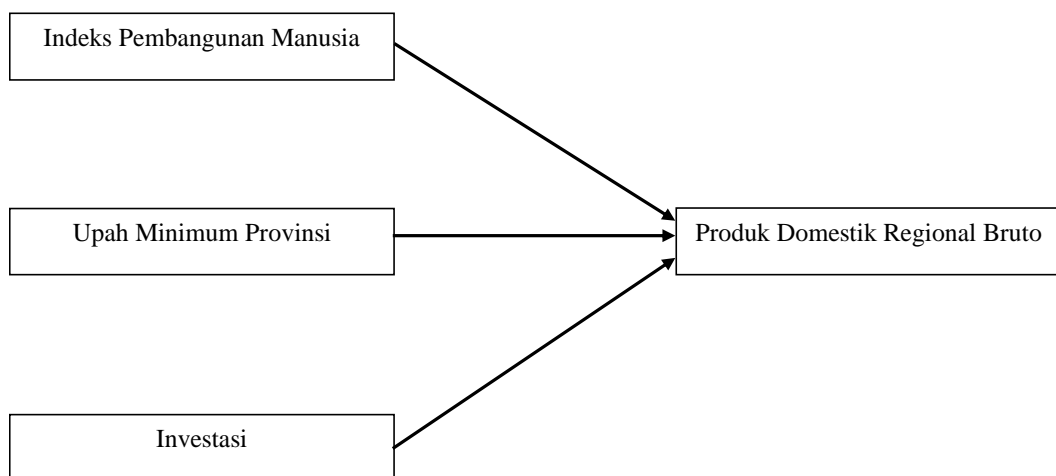
Dalam teori ekonomi pembangunan, diketahui bahwa terdapat hubungan timbal balik yang positif antara tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi. Hubungan ini terjadi karena, di satu sisi, semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, semakin besar pula porsi pendapatan yang dapat disimpan, sehingga jumlah investasi yang dihasilkan juga akan meningkat (Ain', 2021).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utomo (2020), Kusuma (2021), dan Ngabiyanto (2024), yang menyatakan bahwa variabel investasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel PDRB. Peningkatan investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Hal ini terjadi karena investasi dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperluas

lapangan kerja, dan mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi. Dengan bertambahnya modal yang dialokasikan untuk infrastruktur, teknologi, dan aktivitas produktif lainnya, produktivitas ekonomi akan meningkat, sehingga nilai PDRB turut bertambah.

Investasi memiliki hubungan yang erat dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), karena investasi berperan sebagai salah satu komponen utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Investasi, baik dalam bentuk modal fisik seperti infrastruktur maupun modal finansial, dapat meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong aktivitas ekonomi. Dengan meningkatnya investasi, kapasitas produksi wilayah juga bertambah, sehingga berkontribusi pada peningkatan PDRB. Sebaliknya, PDRB yang tinggi juga dapat menarik lebih banyak investasi karena mencerminkan potensi ekonomi yang stabil dan berkembang.

Kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini memiliki beberapa hipotesis, yaitu:

1. Diduga IPM, UMP, dan Investasi berpengaruh positif secara parsial terhadap PDRB Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013-2023
2. Diduga IPM, UMP, dan Investasi berpengaruh secara bersama-sama terhadap PDRB Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013-2023